

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Asia Selatan merupakan kawasan regional yang sejak lama telah menjadi sorotan dalam dunia internasional. Peralnnya dalam dinamikanya, Asia selatan secara geopolitik telah membentuk rivalitas kekuatan dua raksasa Asia, yakni India dan China. Meskipun dilain sisi kedua negara memiliki hubungan kerjasama yang baik, namun hubungan bilateral kedua negara tersebut seringkali dihadapkan pada pola persaingan dan kecurigaan, terutama dalam menempatkan posisinya untuk mencapai pengaruh signifikan di kawasan Asia Selatan, sehingga menyebabkan hubungan keduanya seringkali menjadi fluktuatif dan bahkan menjadi sangat kompleks. Oleh sebab itu, kawasan Asia Selatan telah menjadi tempat utama dari rivalitas kekuatan besar India dan China (Madan, 2021). Peralnnya, kawasan Asia Selatan merupakan tempat bagi hampir dari dua miliar orang di dunia dan juga merupakan salah satu kawasan yang memiliki perekonomian yang paling dinamis, serta merupakan jalur paling penting bagi pelayaran Internasional, dan juga penting dalam pengkonsolidasi ambisi geoeonomi dan geopolitik oleh beberapa negara, salah satunya adalah pengejaran ambisi antara India dan China (Donnellon-May, 2023a).

Rivalitas antara India dan China di Asia Selatan telah tereskalasi dalam berbagai isu terutama dalam hal mengkonsolidasi pengaruhnya di berbagai aspek. Kedua negara juga didukung dengan keunggulan dominan di berbagai sektor penting seperti ekonomi, politik, kekuatan militer, jumlah populasi, hingga teritorial yang besar telah turut menempatkan keduanya sebagai negara yang paling bersaing di Asia. Hal ini kemudian memicu persaingan antara India dan China untuk saling mempengaruhi dan berupaya memperlebar serta mengkonsolidasi pengaruh strategis mereka terkhusus

di Asia Selatan dan Samudera Hindia (Donnellon-May, 2023b). Hal ini karena kedua negara juga merupakan transisi kekuatan dunia yang sedang bangkit.

Dalam beberapa dekade, di bawah pemerintahan presiden Xi Jinping, China telah mengalami kebangkitan yang sangat pesat terutama pada aspek ekonomi, politik dan militer telah menjelma sebagai kekuatan yang sedang naik daun. Pertumbuhan yang pesat ini kemudian mendorong ambisi China untuk terus memperkuat posisinya, pemerintah China kemudian menerapkan kebijakan luar negeri strategisnya yang dikenal dengan *Belt & Road Initiative (BRI)*. Kebijakan luar negeri BRI adalah strategi kebijakan ekonomi dan politik, merupakan kebijakan ambisius yang dimiliki China di sepanjang jalur sutra. Namun, karena kedekatannya, Asia Selatan juga sama pentingnya bagi China. Sejak 2013, setelah pengumuman *Belt and Road Initiative (BRI)*, keterlibatan China di Asia Selatan meningkat pesat (Aryal, 2022). Upaya China dalam memobilisasi pengaruhnya di Asia Selatan dijalankan dengan menawarkan kerjasama seperti proyek Infrastruktur dan investasi yang besar terhadap negara-negara Asia Selatan, yang kemudian dapat mendukung akses perluasan pengaruh masif China di kawasan tersebut.

Namun, sebagai entitas negara yang memiliki pengaruh dominan di kawasan, India menganggap kehadiran China menjadi bentuk kekhawatiran sekaligus ancaman terhadap kedaulatannya di Asia Selatan, mengingat secara historis kedua negara pernah terlibat dalam konflik besar pada 1962 yang bermuara pada sengketa perbatasan. Oleh karena itu, masuknya pengaruh China di Asia Selatan telah menjadi jejak dilema dan kegelisahan bagi India, pasalnya kebangkitan China telah membawa komitmen kerjasama serta didukung dengan kemajuan modernisasi militer yang berkembang pesat dapat menjadikan China sebagai kekuatan dan pengaruh kuat di kawasan itu. Negara ini menggunakan kekuatan finansial yang besar untuk menarik negara-negara Asia Selatan ke dalam lingkup pengaruh mereka (Nga And Thuong, 2021). Akibatnya, hubungan China dengan negara-negara tetangga India di Asia

Selatan semakin meningkat yang ditandai dengan dibentuknya berbagai koridor kerjasama BRI seperti *Trans Himalaya Multi-Dimension Connectivity Network* (THMCN), *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC), *BCIM* (Bangladesh, China, India, dan Myanmar), dan *Maritime Silk Road* (MSR). Keempat koridor dan proyek infrastruktur China tersebut telah menempati lingkup kepentingan strategis India (Baruah, 2018). Dimana jangkauan koridor kerjasama yang diprakarsai China tersebut sebagian besar merupakan jalur strategis India dalam menunjang kepentingannya di kawasan Asia Selatan.

Meningkatnya hubungan kerjasama China dengan tetangga India telah menimbulkan rasa ketidaknyamanan (Aryal, 2022). Ketidaknyamanan India terhadap pengaruh China di kawasan Asia Selatan telah dianggap mempengaruhi dan mengancam posisi strategis India sebagai kekuatan dominan di kawasan Asia Selatan. Baruah (2018) dalam penelitiannya juga menjelaskan, India khawatir bahwa proyek infrastruktur yang didanai oleh China dapat: Pertama, bertentangan dengan standar dan norma internasional yang diterima; kedua, melemahkan klaim kedaulatan India atas wilayah perbatasan yang disengketakan dan kepentingan keamanan lainnya, terutama China dan Pakistan; dan ketiga, memberi China pengaruh geopolitik yang lebih besar dan pengaruh ekonomi dan diplomatik yang tidak semestinya atas keputusan pembuatan kebijakan tetangga India dengan cara yang merugikan India (Baruah, 2018). Hal ini karena Asia selatan merupakan kawasan yang penting bagi India dalam mempertahankan dan mengkonsolidasi status kekuatannya sebagai pemimpin di kawasan Asia Selatan yang dapat menjadi batu loncatan bagi India dalam mencapai kepentingannya untuk menjadi kekuatan utama di dunia.

Mengingat pengaruh China yang semakin meningkat dengan negara-negara tetangga India di Asia Selatan, Narendra Modi berupaya memperkuat pengaruh India atas negara-negara di kawasan Asia Selatan yang diterapkan ke dalam kebijakan *Neighbourhood First* yang menjadi kebijakan Modi untuk memperkuat pilar India

sebagai pemimpin dominan di kawasan. Dalam acara pelantikannya pada 2014, perdana Menteri India Narendra Modi mengundang semua kepala pemerintahan *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) seperti Bangladesh, Nepal, Bhutan, Srilanka, Afganistan, dan Pakistan untuk menekankan pentingnya Kebijakan “Neighbourhood First”-nya (Wagner & Tripathi, 2018). Selanjutnya, pada undangan keduanya, Narendra Modi pada upacara pengambilan sumpah masa jabatan keduanya pada 2019 mengundang pemimpin negara yang tergabung dalam keanggotaan *Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation* (BIMSTEC), hal tersebut telah menandai bahwa kebijakan ‘*Neighbourhood First*’ merupakan salah satu tiang utama dari kebijakan luar negeri India (Ministry of External Affairs, 2023). Melalui kebijakannya, Narendra Modi berupaya untuk membentuk kembali ikatan yang kuat dalam berupaya mewujudkan konektivitas dan integrasi India dengan negara-negara di Asia Selatan. Hal ini telah disampaikan pada pidatonya yang telah dihadiri oleh 140 perwakilan negara (Gateway house, 2014), Narendra Modi dalam pidatonya mengatakan:

“But I want to focus on our relationship with our neighbors in my speech.”

Kebijakan NFP sebagai bentuk upaya India dalam membentuk kembali hubungan baik dan kerjasama dengan tetangganya di berbagai aspek penting (Srivastava, 2022). Selain itu, dalam langkah ini, kebijakan NFP India merupakan bagian dari upaya Modi dalam mewujudkan Visi-nya *Vasudhaiva Kutumbakam* yang diartikan sebagai “Dunia Sebagai Satu Keluarga”. Dimana kebijakan *Neighbourhood First* India merupakan tumpuan atas tanggung jawab India dengan tetangganya dalam upaya membentuk sebuah aturan dan tatanan dalam memelihara multilateralisme kawasan Asia Selatan serta untuk dapat membentuk lingkup yang damai dan keamanan di Samudera Hindia.

Berdasarkan hasil rangkuman laporan dari ketua komite tetap India untuk urusan luar negeri Mr. Chaudhary dalam penyerahan laporan mengenai “*Neighbourhood First Policy*” pada 25 Juli 2023. Dalam laporannya menjelaskan “*Neighbourhood First*

Policy" disusun untuk dapat memperkuat hubungan India dengan negara prioritas di Asia Selatan seperti Bangladesh, Afganistan, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan Myanmar (Mallick, 2023). Yang mana kebijakan *Neighbourhood First* India berfokus dalam upaya menciptakan hubungan yang damai serta untuk dapat membentuk pola hubungan bersama dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan, dimana hubungan tersebut mencakup berbagai aspek antara lain ekonomi, teknologi, pendidikan, penelitian, konektivitas, keamanan dan pertahanan, program luar angkasa, dan lingkungan (Iasgyan.in, 2022). Upaya Modi dari kebijakan ini juga dapat di artikan sebagai langkah dalam menjaga posisi dan peran India di kawasan Asia Selatan sebagai negara yang memiliki pengaruh yang besar. Hal ini juga diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Narendra Modi melalui pidatonya di dalam kongres 69th *Session of The United Nations General Assembly (UNGA)* yang diadakan di New York pada tahun 2014 (Chaturvedy, 2014). Narendra Modi menekankan mengenai arah dari kebijakan *Neighbourhood First*-nya dengan mengatakan :

"A nation's destiny is linked to its neighbourhood. That is why my government has placed the highest priority on advancing friendship and cooperation with its neighbours"

Meskipun tidak diungkapkan secara gamblang, namun dalam isi pidato tersebut menyiratkan bahwa, untuk dapat mempertahankan dan mengkonsolidasi status kekuatan dominannya dikawasan, India harus menjalin hubungan yang erat dengan lingkungannya diberbagai aspek, yaitu negara-negara tetangganya Asia Selatan. Dengan begitu India dapat memperkuat posisinya atas kawasan regionalnya mengingat masuknya pengaruh ambisius China yang semakin pesat di Asia Selatan hingga Samudera Hindia.

Pasalnya, sejak pengaruh China mulai terlibat secara mendalam di Asia Selatan, rivalitas India dan China di kawasan tersebut telah membawa permusuhan daripada stabilitas (Aryal, 2022). Sehingga membawa kawasan ini berimplikasi pada ajang

rivalitas oleh dua kekuatan besar Asia yang saling tarik menarik antara India dan China. Patalnya India menganggap kebijakan luar negeri BRI sebagai landasan China sebagai upaya untuk memperkuat kekuatan militernya, meskipun secara nilai dapat memberikan keuntungan ekonomi di Asia Selatan. Hubungan kedua negara yang kompleks telah menunjukkan sikap yang saling bersinggungan di kawasan Asia Selatan, karena kedua negara telah berupaya membentuk status kekuasaan regional, yaitu dengan mengkonsolidasi posisi dominan dengan menaruh kepentingan di kawasan (Alfian, 2021). Sejalan dengan itu, penerapan kebijakan *Neighbourhood First* India dibawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi adalah konkretisasi perjalanan ini di kawasan Asia Selatan. Artinya, India secara proaktif menunjukkan posisi sikap kepemimpinannya di Asia Selatan dan tidak pasif dalam menanggapi pengaruh dari China di kawasan (Nga & Thuong, 2021). Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti Mengapa Kebijakan *Neighbourhood First* di Era Narendra Modi Dalam Mempertahankan Status Dominasi India Mempengaruhi Tensi Geopolitik Dengan China di Kawasan Asia Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari uraian latar belakang penelitian diatas, maka pokok permasalahan yang dapat ditarik dari penelitian tersebut adalah: Mengapa Kebijakan *Neighbourhood First* di Era Narendra Modi Dalam Mempertahankan Status Dominasi India Mempengaruhi Tensi Geopolitik Dengan China di Kawasan Asia Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah untuk dapat menganalisis dan menjelaskan terkait hubungan Rivalitas India-China terkait Eskalasi Ketegangan di Kawasan Asia Selatan serta mengaplikasikan teori realis dalam penelitian yang diangkat oleh penulis.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat pada penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan dan sarana dalam menambah wawasan mengenai Studi Hubungan Internasional serta dapat menjadi sarana referensi khususnya bagi akademisi program Studi Hubungan Internasional yang tertarik tentang kajian terkait hubungan rivalitas ekonomi dan geopolitik India yang mempengaruhi tensi geopolitik dengan China di Asia Selatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penelitian, sistematika penulisan merupakan bagian yang penting untuk disusun dalam sebuah penelitian, untuk dapat memudahkan bagi penulis dalam menyusun bagian-bagian skripsi yang diuraikan dalam bentuk bab hingga sub-bab dan memudahkan bagi pembaca dalam memahami alur dan keterkaitan dari isi penelitian. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang dibagi dalam beberapa susunan bab antara lain:

Bab I Pendahuluan, pada bagian dalam bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan penelitian yang fokus menjelaskan permasalahan terkait hubungan India dan China di kawasan Asia Selatan. Dalam bagian bab ini juga tersusun rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bagian bab ini memaparkan mengenai landasan teoritis yang digunakan dalam menganalisa pokok permasalahan dalam penelitian. Pada bagian bab ini juga berisi tentang pemaparan mengenai penelitian terdahulu dan diuraikan sebagai perbandingan dengan penelitian penulis yang terkait pada pokok permasalahan.

Bab III Metodologi Penelitian, pada bagian bab ini memaparkan mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, teknik pengumpulan data hingga teknik analisis data untuk menjawab pertanyaan riset yang telah ditetapkan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan tentang pokok dari permasalahan yang sedang diteliti yang terdiri dari beberapa bagian sub-bab yang dianalisa dalam menjawab pertanyaan riset.

Bab V Kesimpulan dan saran, pada bab ini kesimpulan sebagai bagian yang memaparkan mengenai hasil akhir dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Serta saran sebagai bagian yang memaparkan mengenai masukan penulis terkait penelitian yang telah dilakukan, yang ditujukan kepada pembaca atau peneliti mengenai kelemahan terkait topik pada ruang lingkup penelitian yang ada.